

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

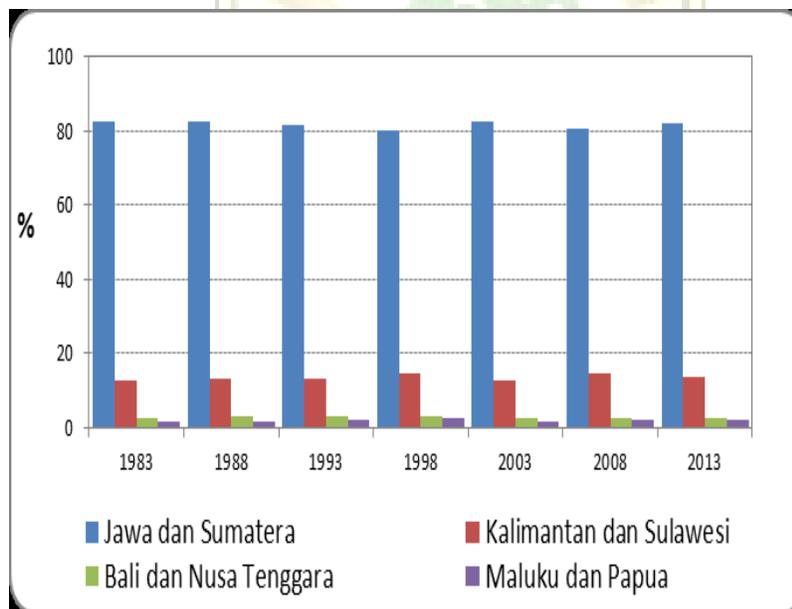
Pertumbuhan ekonomi yang menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan (*disparity*) terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral. Golongan kaya makin kaya sedangkan kaum miskin makin miskin, wilayah maju terus berkembang pesat meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor unggulan yang berkontribusi besar bagi pembangunan, sehingga sektor non unggulan yang membebani (Mopangga, 2011).

Salah satu tantangan utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1983-2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB (lihat gambar 1.1)

Ketimpangan pembangunan terjadi dalam skala lokal dan nasional. Dalam lingkup internasional, ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah terlihat nyata. Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan apabila tidak mampu dieliminir secara hati-hati dapat menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan serta dalam konteks makro sangat merugikan proses dan hasil pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah.

Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2000)

**Gambar 1.1 Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (1983-2013)**



Sumber: Bappenas dalam RPJMN 2014-2019

Fakta menunjukkan peningkatan ketimpangan pembangunan yang terjadi di negara-negara berkembang sebenarnya bukanlah karena kesalahan pemerintah atau masyarakatnya, tetapi hal tersebut terjadi secara alamiah (natural) di semua negara. Bahkan ketika Amerika Serikat mulai melaksanakan proses pembangunan

negaranya pada abad ke-18 dulu, peningkatan ketimpangan pembangunan antarwilayah juga meningkat tajam. Peningkatan ketimpangan ini bahkan sampai memicu terjadinya perang saudara antara negara bagian di Selatan yang masih relatif tertinggal dengan negara bagian Utara yang sudah lebih maju. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia dengan adanya pemberontakan PRRI-Permesta di Sumatera Barat tahun 1957, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), (Sjafrizal, 2012).

Semenjak pemerintahan orde baru berakhir, terjadi isu tuntutan tentang perimbangan wewenang pemerintah pusat dan daerah. Akhirnya UU No. 5 Tahun 1974 dirubah menjadi UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintah daerah. Dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004 memberikan perubahan hubungan pemerintah pusat dan daerah, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari bentuk sentralistis menjadi desentralistis, artinya pengalihan sebagian besar wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (otonomi daerah). sedangkan wewenang yang tetap menjadi otoritas pemerintah pusat adalah dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, serta agama.

Otonomi daerah, diharapkan dapat dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pembangunan ekonomi yang lebih baik dan lebih merata merupakan tujuan utama yang harus dicapai dalam otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah semua masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia bisa menikmati hasil pembangunan dan tidak lagi terfokus hanya untuk Pulau Jawa. Dibalik harapan bahwa Otonomi Daerah dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Otonomi Daerah juga berpotensi meningkatkan disparitas pendapatan regional jika tidak dikelola dengan baik (Lessman, 2006). Kekhawatiran ini muncul karena dalam sistem desentralisasi, Pemerintah Daerah mengelola anggaran masing-masing dengan mempertimbangkan kesejahteraan warganya tanpa berkewajiban memperhatikan warga diluar wilayahnya.

Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda, oleh karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal yakni perbedaan pada distribusi pendapatan serta secara horizontal yakni perbedaan antara daerah maju dan terbelakang (Sjafrizal, 2008).

Di wilayah provinsi Sumatera Barat, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada tahun 2014 adalah sebesar 378 ribu turun dari tahun 2013 yang berjumlah 384,1 ribu jiwa. Dari penduduk miskin tahun 2013 terdapat 37,18% penduduk miskin bekerja di sektor pertanian, 38,92% tidak bekerja dan 23,89% bekerja di bukan sektor pertanian. Sementara kabupaten terbesar angka kemiskinannya pada tahun 2013 adalah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 38,3 ribu jiwa, sementara untuk kota, Kota Padang yang memiliki angka kemiskinan terbesar pada tahun 2013 yakni sebesar 44,2 ribu jiwa. Sementara itu nilai PDRB

di Sumatera Barat atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2013 adalah 46.640,23 milyar rupiah dan pada tahun 2014 menjadi 49.365,754 milyar rupiah. Sedangkan menurut harga berlaku, nilai PDRB tersebut meningkat 13,72 persen dari 127.099,94 milyar rupiah pada tahun 2013 menjadi 145.796,35 milyar rupiah pada tahun 2014. (SBDA 2015).

**Tabel 1.1 Perbandingan Indikator Ekonomi Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2005 Dan Tahun 2014**

Uraian	Kondisi 2005	Kondisi terakhir 2014
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	5,85
Penduduk (Juta Jiwa)	4,56	5,13
Pengangguran (%)	13,34	6,50
Kemiskinan (ribu jiwa)	-	378
Inflasi (% pertahun)*	6,90**	11,90*
PDRB Rill (Juta Rupiah)	29.159.530	49.365.754
PDRB per kapita Rill (Juta Rupiah)	6.386.043,78	25.963.253,50
Pengeluaran per kapita Rill disesuaikan (Rupiah)	-	800.515,11
Nilai Ekspor (US\$)	-	2,10
Belanja Pemerintah (ribuan Rupiah)	1.550.992.188**	3.635.837.760
Angka Harapan Hidup (tahun)	68,23	68,32***
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,04	8,29***
IPM dan Rangkaing Nasional	71,19	69,36***

Sumber : BPS, diolah

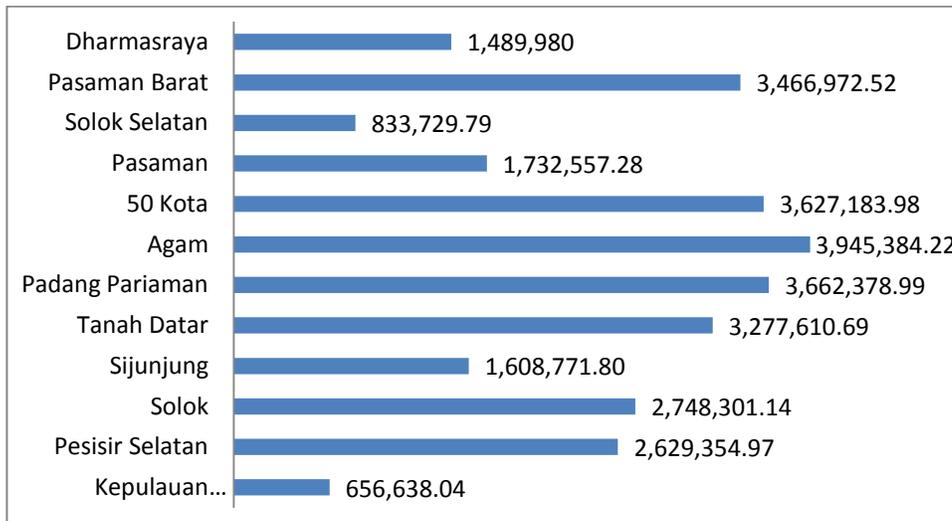
\*Inflasi kota padang

\*\* data tahun 2007 (data tahun 2005 tidak tersedia)

\*\*\* IPM dengan metode baru

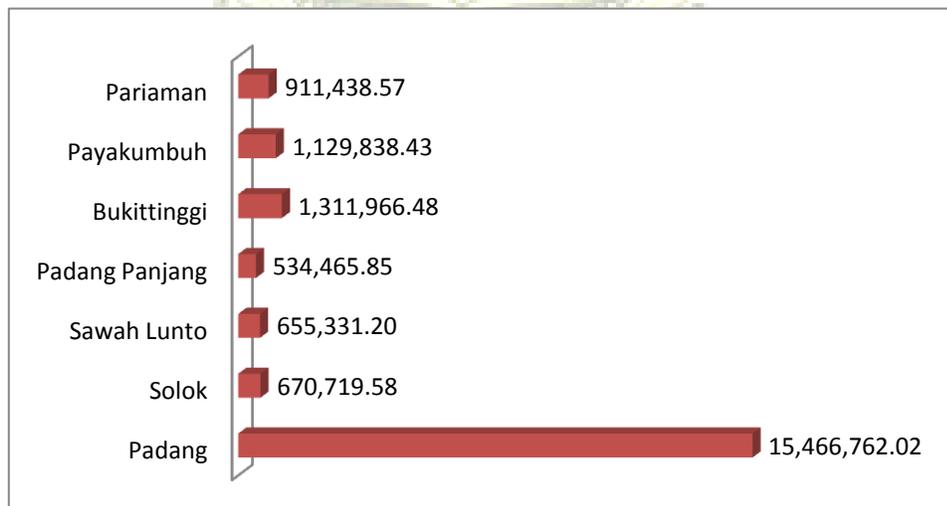
- Data tidak tersedia

**Gambar 1.2 PDRB Antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat  
Berdasarkan Harga Konstan 2000, Tahun 2014 (Juta Rupiah)**



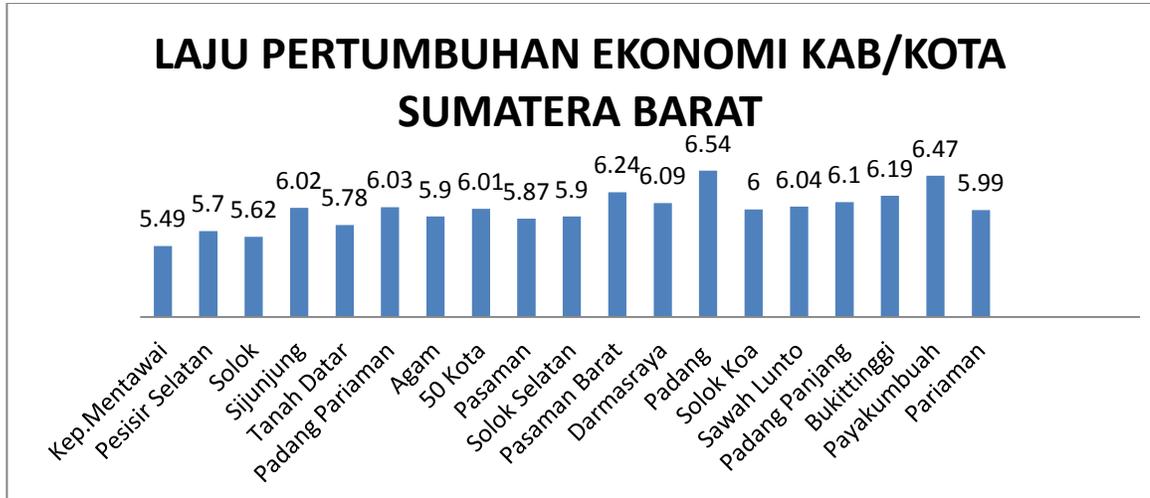
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, data diolah

**Gambar 1.3 PDRB Antar Kota di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan  
Harga Konstan 2000, Tahun 2014 (Juta Rupiah)**



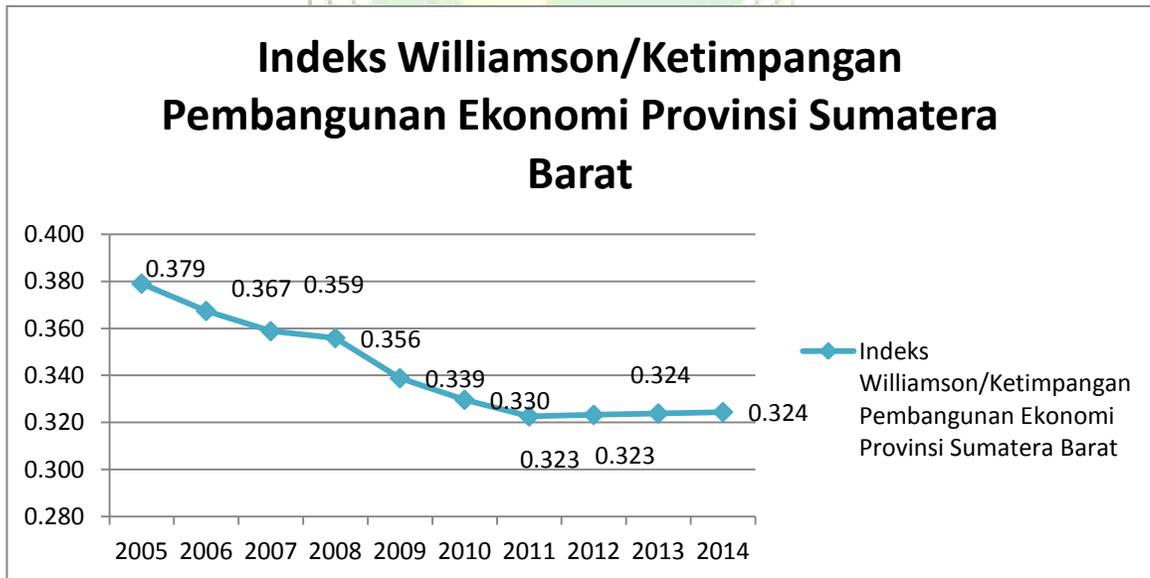
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, data diolah

**Gambar 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Harga Konstan 2000, Tahun 2014 (%)**



Sumber: : BPS Provinsi Sumatera Barat, data diolah, data diolah

**Gambar 1.5 Indeks Ketimpangan Williamson/Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2014**



Sumber : Lampiran 2 A- J, data diolah

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan antar daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkatkan bukannya menurun, sehingga akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan antardaerah. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000)

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisa sejauh mana ketimpangan antar wilayah (*Region Disparity*) yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat serta apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan tersebut. Selain itu dalam penelitian ini akan dibahas juga klasifikasi daerah berdasarkan Tipologi Klassen. Sehingga peneliti tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **”ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan disampaikan:

1. Bagaimana klasifikasi kabupaten/kota di berdasarkan Tipologi Daerah di Provinsi Sumatera Barat?
2. Berapa besar tingkat ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat dan seberapa besar pengaruhnya terhadap ketimpangan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis posisi perekonomian kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat berdasarkan Tipologi Daerah dengan menggunakan analisis Klassen.
2. Menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap ketimpangan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan dan terjawabnya masalah dalam penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat untuk berbagai kalangan. Baik dari kalangan akademisi, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

**Untuk akademisi** adalah memberikan pengetahuan secara ilmiah kepada para mahasiswa, dosen dan peneliti bagaimana kondisi ketimpangan ekonomi di

Provinsi Sumatera Barat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketimpangan tersebut. **Untuk pemerintah dan para perencana pembangunan**, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan atau bahan evaluasi pemerintah dan para perencana pembangunan untuk membuat berbagai program kebijakan pembangunan. Kebijakan tersebut utamanya adalah yang berkaitan dengan dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar wilayah agar bagaimana pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan ketimpangan antar kabupaten/kota semakin berkurang. Sebagaimana tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan, tujuan pembahasan yang dikemukakan di atas, maka pada ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini akan membahas:

1. Untuk analisis gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi (Tipologi Daerah) masing-masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat menggunakan alat analisis yang disebut dengan Analisis Tipologi Klassen (Klassen Typology Analysis).
2. Pengukuran ketimpangan ekonomi wilayah (*regional disparity*) dengan menggunakan Indeks Williamson (Vw) yang mampu menghitung besarnya koefisien ketimpangan regional di Provinsi Sumatera Barat.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat hanya akan mengkaji 3 variabel yaitu ; Invetasi Swasta (PMDN dan PMA), Pengeluaran pemerintah, dan tingkat pengangguran.

4. Wilayah atau studi kasus penelitian adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu 19 Kabupaten/kota (12 kabupaten dan 7 kota).
5. Data yang digunakan adalah data PDRB Produk Domestik Regional Bruto perkapita atas dasar harga konstan tahun 2000 dan harga berlaku masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat.
6. Data yang digunakan untuk menaksir hubungan variabel adalah selama periode 10 tahun (2005-2014). Alasan dipilihnya tahun 2005 sebagai tahun awal penelitian karena pada tahun tersebut seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat telah lengkap berjumlah 21. Sebelumnya pada tahun 2004 telah terbentuk 2 daerah kabupaten di Sumatera Barat yakni Kabupaten Dharmasraya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Solok. Sehingga data lengkap untuk kedua kabupaten tersebut baru tersedia pada tahun 2005.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari; berisi teori yang mendasari dan mendukung penelitian ini yaitu meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, teori ketimpangan wilayah, metode Indeks Williamson, Hipotesis Kurva U-Terbalik versi Williamson, kerangka pemikiran teoritis dan Studi Literatur Terdahulu serta hipotesa penelitian.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Terdiri dari; jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, analisis data dan metode analisis.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Terdiri dari; keadaan geografis Provinsi Sumatera Barat, keadaan penduduk, perekonomian, struktur ekonomi dan pendapatan perkapita di Provinsi Sumatera Barat.

### **BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari; Analisis Tipologi Klassen (Klassen Tipologi Analysis), analisis ketimpangan pembangunan ekonomi dan uji statistik faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan.

### **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdiri dari; kesimpulan dan saran.

